

PENGARUH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH MELALUI KINERJA APARATUR BPKAD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nurul Khafizah¹, Dita Marisa Putri²

STIKES Abdurahman Palembang, Sumatera Selatan¹,

STIA Satya Negara, Palembang, Sumatera Selatan²

nurulkhafizah19@gmail.com , ditamarisa87@gmail.com

ABSTRAK

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan indikator penting tata kelola yang baik, mencerminkan transparansi dan kepercayaan publik. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan kapasitas pejabat yang terbatas dan kurangnya inovasi dalam proses pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh penelitian dan pengembangan (R&D) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan kinerja pejabat sebagai variabel mediasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan korelasi kuantitatif. Populasi terdiri dari 80 pejabat BPKAD, dengan 45 responden dipilih melalui sampling acak sederhana. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan wawancara terstruktur, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, termasuk laporan keuangan dan arsip kebijakan. Teknik analisis data meliputi pengujian validitas dan reliabilitas, statistik deskriptif, analisis regresi berganda, dan pengujian mediasi menggunakan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian dan pengembangan memiliki dampak positif terhadap kinerja pejabat, kinerja pejabat secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dan penelitian dan pengembangan secara langsung meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, kinerja pejabat terbukti menjadi mediator dalam hubungan antara penelitian dan pengembangan dengan akuntabilitas keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kegiatan penelitian dan pengembangan meningkatkan akuntabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung melalui peningkatan kinerja pejabat.

Katakunci: Akuntabilitas, Kinerja Aparatur, Pengelolaan Keuangan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

ABSTRACT

Accountability in regional financial management is a crucial indicator of good governance, reflecting transparency and public trust. Nevertheless, its implementation still faces challenges, particularly related to officials' limited capacity and insufficient innovation in financial management processes. This study aims to examine the influence of research and development (R&D) on the accountability of regional financial management, with officials' performance as a mediating variable at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of South Sumatra Province. This study employs a quantitative correlational approach. The population consists of 80 BPKAD officials, with 45 respondents selected through simple random sampling. Primary data were collected using questionnaires and structured interviews, while secondary data were obtained from official documents, including financial reports and policy archives. Data analysis techniques include validity and reliability testing, descriptive statistics, multiple regression analysis, and mediation testing using

SmartPLS software. The results indicate that research and development has a positive effect on officials' performance, officials' performance significantly influences regional financial management accountability, and research and development directly enhances accountability. In addition, officials' performance is proven to mediate the relationship between research and development and financial accountability. These findings demonstrate that strengthening R&D activities improves accountability both directly and indirectly through enhanced officials' performance

Keywords: *Accountability, Officials' Performance, Regional Financial Management, Research and Development*

A. PENDAHULUAN

. Dampak reformasi birokrasi yang terjadi di Indonesia adalah terjadinya perubahan sistem pemerintahan sentralisasi di pemerintah pusat menjadi sistem pemerintahan desentralisasi di pemerintah daerah. Perubahan pada sistem pemerintahan memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, dan yang terbaru yaitu UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam penerapan tata kelola yang baik (*good governance*), menjadi kebutuhan mendesak diberbagai Negara, termasuk Indonesia. Salah satu elemen dalam tata kelola yang baik yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

World Bank (2020:158) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan publik merupakan tolok ukur dalam menilai kualitas pemerintahan sekaligus tingkat kepercayaan masyarakat. Karena itu, penguatan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan daerah menjadi salah satu prioritas dalam agenda reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan di level daerah. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat untuk dilakukan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik semakin meningkatkan perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia (Halim & Kusufi, 2014). Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pengguna laporan keuangan (Sande, 2013).

Secara global, Penelitian dan Pengembangan (*Research and Development* atau R&D) dipandang sebagai motor penggerak utama inovasi serta peningkatan mutu pelayanan publik. Soete et al. (2021) menjelaskan bahwa

investasi dalam penelitian dan pengembangan publik berkontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi sistem ekonomi serta tata kelola sektor publik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan R&D publik tidak hanya meningkatkan kapasitas inovatif pemerintah, tetapi juga menciptakan mekanisme manajemen yang lebih adaptif dan berbasis bukti dalam pengambilan keputusan.

Kota Palembang sebagai salah satu kota besar dan pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan dana APBD. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah, khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan daerah. Lembaga ini bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah (bpkad.palembang.go.id). Dalam era

reformasi birokrasi dan tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), keberadaan BPKAD menjadi sangat penting karena menyangkut langsung proses manajemen keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) (2022:12), mengungkapkan adanya sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan di beberapa kabupaten atau kota di wilayah Sumatera Selatan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa inovasi dan kinerja aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih belum berjalan secara maksimal, sehingga berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas keuangan daerah, yang berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hakim dkk., (2025), dalam studi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh, ditemukan bahwa kinerja aparatur merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Kondisi serupa bisa menjadi penyebab rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan di BPKAD apabila kinerja aparatur belum optimal. Padahal, kinerja aparatur yang profesional sangat dibutuhkan agar pengelolaan keuangan dapat berlangsung secara efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Teori *good governance* menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Sedarmayanti, 2020). teori akuntabilitas publik menjelaskan bahwa setiap aparatur

memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik secara transparan dan sesuai dengan ketentuan (Romzek dan Dubnick, 1987).

Selain itu, Sugiyono (2023) mengatakan teori inovasi dan Penelitian dan Pengembangan menegaskan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan berperan penting dalam menghasilkan pembaruan, efisiensi, dan perbaikan sistem pengelolaan keuangan publik. Selanjutnya, teori Kinerja Aparatur Publik menyoroti bahwa kinerja aparatur sipil negara mencerminkan sejauh mana individu mampu menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel (Putra dan Sari, 2021).

Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja aparatur sipil negara karena mampu melahirkan inovasi kebijakan dan metode kerja yang lebih efektif, Ahmad dan Wati (2024).

Sari dkk., (2023), juga menegaskan bahwa kinerja aparatur berpengaruh nyata terhadap akuntabilitas keuangan daerah, sehingga semakin baik kinerja yang ditunjukkan aparatur sipil negara maka semakin tinggi pula tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

Hal ini diperkuat oleh Eliana dkk., (2024) yang menyoroti bahwa kompetensi aparatur dan penerapan akuntabilitas mampu meningkatkan kinerja. Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda, sehingga hubungan antara variabel-

variabel tersebut belum sepenuhnya konsisten.

Kinerja aparatur memiliki peran penting sebagai penghubung antara kegiatan penelitian dan pengembangan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Secara teoritis, konsep ini dijelaskan melalui teori kinerja aparatur publik dan teori akuntabilitas publik. Menurut Creswell (2022:113), kinerja merupakan hasil kerja individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas sesuai standar dan tanggung jawab organisasi.

Dapat disimpulkan, baik teori maupun penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kinerja aparatur berfungsi sebagai variabel perantara yang menjelaskan bagaimana hasil penelitian dan pengembangan dapat berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas keuangan daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru baik secara teoretis, yakni memperkaya literatur tentang tata kelola pemerintahan daerah, maupun secara praktis, yakni memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah khususnya BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

Kajian Teori

Teory Good Governance

Sedarmayanti (2020:56), *Good Governance* adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Artinya, pemerintahan yang baik harus mampu mengoptimalkan sumber daya publik melalui kebijakan yang efektif serta

pelaksanaan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks penelitian ini, *Good Governance* memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan penelitian dan pengembangan, kinerja aparatur, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor publik menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan prinsip efektivitas dan efisiensi yang diamanatkan dalam *Good Governance* (Putra dan Wati, 2024). Dwiyanto (2018:7) yang menyebut bahwa tata kelola pemerintahan akan berjalan baik jika aparatur mampu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan dinamika birokrasi.

Teori Inovasi Penelitian dan Pengembangan

Sugiyono (2023:394) mendefinisikan penelitian dan pengembangan sebagai kegiatan sistematis untuk menciptakan atau menyempurnakan produk melalui riset dan inovasi yang dirancang secara terencana. Tujuannya ialah membantu organisasi mencapai sasaran strategis melalui peningkatan mutu kerja, efektivitas, dan efisiensi proses.

Menurut Damanpour (1991), inovasi diartikan sebagai penerapan ide, sistem, atau praktik baru dalam suatu organisasi. Penelitian dan pengembangan dipandang sebagai sarana utama untuk menghadirkan inovasi yang mampu mendukung peningkatan efektivitas organisasi.

Hilmawan dkk., (2023) menambahkan bahwa dalam Sektor Publik, Penelitian dan Pengembangan sangat penting untuk mendorong

kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) sekaligus memperbaiki mekanisme pelayanan publik. Efendi dan Frinaldi (2024) menyatakan bahwa Penelitian dan Pengembangan di instansi pemerintah tidak hanya sebatas riset teknis, tetapi juga mencakup kajian kelembagaan, perbaikan prosedur, serta evaluasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan persoalan tata kelola.

Hipotesis Penelitian

Penelitian ini mengajukan empat hipotesis yang saling berkaitan. Pertama, R&D memiliki pengaruh terhadap kinerja aparatur. Kedua, kinerja aparatur memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ketiga, R&D berhubungan langsung dengan akuntabilitas keuangan daerah. Keempat, kinerja aparatur berperan sebagai mediator dalam hubungan R&D dengan akuntabilitas. Formulasi hipotesis ini sejalan dengan konsep akuntabilitas publik yang menekankan pentingnya transparansi dan pertanggungjawaban Nazir (2021) dan, Sari dan Abdullah (2021). Berikut adalah hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini :

H1 : Penelitian dan pengembangan berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

H2 : Kinerja aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

H3: Penelitian dan pengembangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan

daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

H4: Kinerja aparatur memediasi pengaruh penelitian dan pengembangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan di penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan jenis penelitian *assosiatif* (kausal). Penelitian dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan, dengan jumlah populasi ditetapkan pada seluruh aparatur yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 80 orang. Adapun untuk menentukan Sampel digunakan rumus *slovin* agar dapat dihitung minimum responden atau sampel :

Rumus *Slovin* :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel yang akan dicari

N : Ukuran populasi keseluruhan

e : Tingkat kesalahan atau margin error yang ditetapkan (misalnya 0,1 untuk 10%)

Rumus *Slovin* :

$$n = N / (1 + N(e)^2)$$

$$n = 80 / (1 + 80(0.1)^2)$$

$$n = 80 / (1 + 80 \times (0.1^2))$$

$$n = 80 / (1 + 0.800)$$

$$n = 80 / 1.800$$

$$n = 44.44$$

Berdasarkan rumus *slovin* diatas penelitian ini dapat ditentukan menggunakan minimum 45 responden. Metode digunakan adalah probability

sampling dengan metode simple random sampling.. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara kuisioner, wawancara dan dokumentasi. penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang valid dan komprehensif mengenai pengaruh penelitian dan pengembangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui kinerja aparatur BPKAD Provinsi Sumatera Selatan. Metode analisis data menggunakan Uji Statistik Deskriptif, *Structural Equation Modeling* (SEM).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Standar Deviation	Scale Min	Scale Max	Kategori
Penelitian dan Pengembangan (X)	4.246	0.811	1	5	Tinggi
Kinerja Aparatur (M)	4.295	0.795	2	5	Tinggi
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)	4.231	0.819	1	5	Tinggi

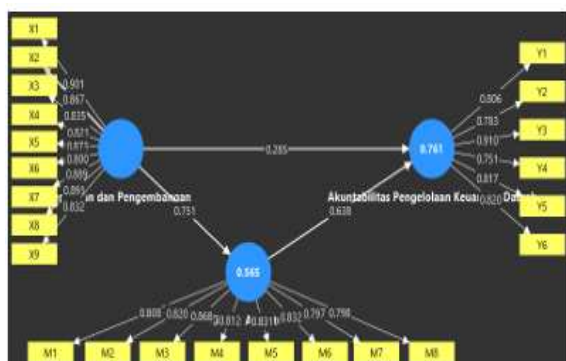
Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai *mean* seluruh indikator berada pada rentang 4,04–4,42 pada skala *Likert* 1–5, yang menunjukkan bahwa responden secara umum memberikan penilaian yang tinggi. Nilai median yang didominasi oleh angka 4 dan 5 mengindikasikan bahwa mayoritas responden berada pada kategori setuju hingga sangat setuju, sehingga mencerminkan persepsi positif terhadap seluruh variabel penelitian.

Seluruh indikator memiliki nilai standar deviasi di bawah 1,10, yang menunjukkan tingkat variasi jawaban responden relatif kecil atau homogen. Selain itu, nilai *skewness* yang dominan bernilai negatif mengindikasikan

distribusi data cenderung mengarah pada skor tinggi, sedangkan nilai *excess kurtosis* berada dalam batas yang dapat diterima, sehingga distribusi data tidak bersifat ekstrem.

Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa data penelitian memiliki kecenderungan penilaian yang tinggi, sebaran data yang stabil, serta distribusi yang relatif normal. Dengan demikian, data dinilai layak untuk dilanjutkan pada tahap analisis outer model dan inner model menggunakan pendekatan *Partial Least Squares* (PLS) guna menguji pengaruh penelitian dan pengembangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui kinerja aparatur BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)



Gambar 2

Evaluasi model pengukuran (*outer model*) merupakan tahapan analisis dalam PLS-SEM yang bertujuan untuk menilai kualitas hubungan antara konstruk laten dengan indikator-indikator pembentuknya. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap indikator mampu mengukur konstruk secara valid dan reliabel. Penilaian *outer model* umumnya mencakup pengujian validitas

konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas konstruk melalui nilai *loading factor*, *Average Variance Extracted* (AVE), *Fornell–Larcker Criterion*, *Heterotrait–Monotrait Ratio* (HTMT), *Cronbach’s Alpha*, serta *Composite Reliability* (Hair et al., 2022; Ghozali, 2023).

Uji Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen merupakan pengujian yang bertujuan untuk menilai sejauh mana indikator-indikator dalam suatu konstruk memiliki tingkat keterkaitan yang tinggi dalam mengukur variabel laten yang sama. Dalam analisis PLS-SEM, validitas konvergen dievaluasi melalui nilai *loading factor* dan *Average Variance Extracted* (AVE), di mana indikator dinyatakan valid apabila memiliki *loading factor* $\geq 0,70$ dan konstruk dinyatakan memenuhi validitas konvergen jika nilai AVE $\geq 0,50$ (Hair et al., 2022). Validitas konvergen dinilai melalui nilai *outer loading* dan *Average Variance Extracted*.

1. Loading Factor

loading Factor di mana suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai *loading factor* lebih besar dari 0,70.

Tabel 2

Loading Factor

Variabel	Rentang Loading Factor	Keterangan
Penelitian dan Pengembangan	0,799–0,901	Valid
Kinerja Aparatur	0,790–0,872	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0,754–0,904	Valid

Berdasarkan hasil pengujian validitas konvergen yang disajikan pada tabel di atas, seluruh indikator pada masing-masing variabel memiliki nilai

loading factor di atas 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan untuk tahap pengujian selanjutnya, yaitu evaluasi reliabilitas dan analisis model struktural.

2. Average Variance Extracted

Validitas konvergen dalam penelitian ini, juga dievaluasi menggunakan nilai Average Variance Extracted (AVE) yang menunjukkan kemampuan konstruk laten dalam menjelaskan varians indikator-indikatornya. Suatu konstruk dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,50.

Tabel
Average Variance Extracted

Variabel	Average variance extracted (AVE)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.671
Kinerja Aparatur	0.664
Penelitian dan Pengembangan	0.735

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan *SmartPLS*, seluruh variabel penelitian memiliki nilai AVE di atas 0,50. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Penelitian dan Pengembangan, Kinerja Aparatur, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah mampu menjelaskan indikator pembentuknya secara memadai. Dengan demikian, seluruh konstruk dinyatakan valid secara konvergen dan model pengukuran layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis selanjutnya.

Uji Validitas Diskriminan

Dalam analisis PLS-SEM, validitas diskriminan umumnya dievaluasi melalui nilai *Fornell–Larcker Criterion* dan

Heterotrait-Monotrait Ratio di mana suatu konstruk dinyatakan memenuhi validitas diskriminan apabila nilai akar kuadrat AVE lebih besar dibandingkan korelasi antar konstruk serta setiap indikator memiliki loading tertinggi pada konstruk yang diukurnya (Ghozali, 2023).

1. Fornell Larcker Criterion

Tabel 4
Fornell Larcker Criterion

	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kinerja Aparatur	Penelitian dan Pengembangan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.819		
Kinerja Aparatur	0.847	0.815	
Penelitian dan Pengembangan	0.751	0.749	0.857

Berdasarkan hasil pengujian validitas diskriminan menggunakan *Fornell–Larcker Criterion* sebagaimana disajikan pada tabel, diketahui bahwa nilai akar kuadrat *Average Variance Extracted* (AVE) pada masing-masing variabel laten lebih besar dibandingkan dengan nilai korelasi antar konstruk lainnya. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki nilai akar AVE sebesar 0,819 yang lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan variabel lain. Variabel Kinerja Aparatur menunjukkan nilai akar AVE sebesar 0,815 yang juga lebih besar dibandingkan nilai korelasinya dengan konstruk lain, sedangkan variabel Penelitian dan Pengembangan memiliki nilai akar AVE sebesar 0,857 yang merupakan nilai tertinggi dibandingkan korelasi antar variabel.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian telah memenuhi kriteria validitas diskriminan, yang menunjukkan bahwa setiap konstruk mampu

membedakan dirinya secara empiris dari konstruk lainnya dalam model penelitian.

2. *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT)

Tabel 5
Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

	Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)
Kinerja Aparatur <-> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0,885
Penelitian dan Pengembangan <-> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0,784
Penelitian dan Pengembangan <-> Kinerja Aparatur	0,780

Berdasarkan hasil pengujian validitas diskriminan menggunakan *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) sebagaimana disajikan pada tabel, diketahui bahwa seluruh nilai HTMT antar konstruk berada di bawah batas toleransi yang direkomendasikan, yaitu < 0,90. Hubungan antara Kinerja Aparatur dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki nilai HTMT sebesar 0,885, hubungan antara Penelitian dan Pengembangan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,784, serta hubungan antara Penelitian dan Pengembangan dengan Kinerja Aparatur sebesar 0,780.

Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel penelitian telah memenuhi validitas diskriminan berdasarkan pendekatan HTMT, yang menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki perbedaan konseptual yang jelas dan mampu membedakan dirinya dari konstruk lainnya secara empiris. Oleh karena itu, model pengukuran dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap pengujian struktural.

Uji Reabilitas Konstruk

Dalam analisis PLS-SEM, reliabilitas konstruk umumnya dievaluasi melalui nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*, di mana suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,70$ dan *Composite Reliability* $\geq 0,70$ (Ghozali, 2023).

Tabel 6
Composite Reliability dan Cronbach's Alpha

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0,918	0,926	0,934
Kinerja Aparatur	0,937	0,941	0,947
Penelitian dan Pengembangan	0,955	0,957	0,961

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas konstruk sebagaimana disajikan pada tabel, diketahui bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (rho_a dan rho_c) yang berada di atas batas minimum yang direkomendasikan, yaitu 0,70. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,918 dengan *Composite Reliability* masing-masing sebesar 0,926 (rho_a) dan 0,934 (rho_c). Variabel Kinerja Aparatur menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,937 serta *Composite Reliability* sebesar 0,941 (rho_a) dan 0,947 (rho_c). Sementara itu, variabel Penelitian dan Pengembangan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,955 dengan *Composite Reliability* sebesar 0,957 (rho_a) dan 0,961 (rho_c).

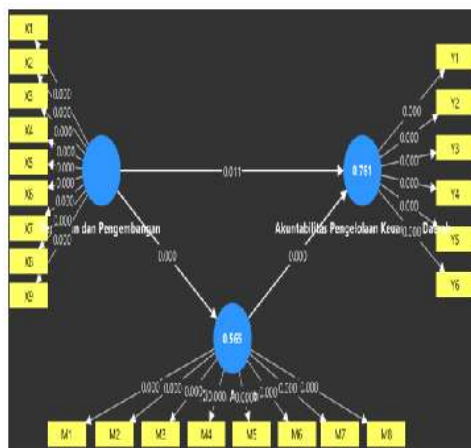
Dengan terpenuhinya seluruh kriteria tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator pada masing-

masing variabel penelitian telah memenuhi reliabilitas konstruk, sehingga instrumen penelitian dinyatakan andal dan layak untuk digunakan dalam pengujian model struktural pada tahap analisis selanjutnya.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan signifikansi pengaruh antar variabel melalui pengujian nilai koefisien jalur (*path coefficient*), nilai koefisien determinasi (R^2), serta *predictive relevance* (Q^2). Hasil *evaluasi inner model* digunakan untuk menentukan tingkat kemampuan model dalam menjelaskan dan memprediksi variabel endogen, sehingga dapat disimpulkan apakah model struktural yang dibangun telah memenuhi kriteria kelayakan secara empiris (Hair et al., 2022; Ghazali, 2023).

1. Model Struktural Penelitian



Gambar 2 *Output Inner Model (Chart)*

Berdasarkan Gambar 4.2 Diagram Model Struktural Penelitian, dapat dilihat bahwa penelitian dan pengembangan memiliki hubungan langsung dengan

kinerja aparatur serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kinerja aparatur juga menunjukkan hubungan langsung dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga dalam model ini kinerja aparatur berperan sebagai variabel intervening.

2. Uji R-Square (R^2)

Tabel 6
Uji R-Square

	R-square	R-square adjusted
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.748	0.737
Kinerja Aparatur	0.561	0.551

Berdasarkan hasil pengujian R-square (R^2) sebagaimana disajikan pada tabel, diketahui bahwa nilai R^2 untuk variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,748 dengan nilai R-square adjusted sebesar 0,737. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Penelitian dan Pengembangan serta Kinerja Aparatur mampu menjelaskan 74,8% variasi Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan sisanya sebesar 25,2% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian.

Sementara itu, variabel Kinerja Aparatur memiliki nilai R^2 sebesar 0,561 dengan R-square adjusted sebesar 0,551, yang berarti bahwa variabel Penelitian dan Pengembangan mampu menjelaskan 56,1% variasi Kinerja Aparatur, sedangkan 43,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model struktural dalam penelitian ini memiliki kemampuan penjelasan yang

kuat hingga moderat, sehingga layak untuk dilanjutkan pada tahap pengujian hipotesis.

3. Uji Signifikan Jalur (Path Coefficient)

Tabel 7

Uji Signifikan Jalur (Path Coefficient)

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Kinerja Aparatur -> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.647	0.647	0.102	6.344	0
Penelitian dan Pengembangan -> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.266	0.271	0.1	2.661	0.008
Penelitian dan Pengembangan -> Kinerja Aparatur	0.749	0.751	0.083	8.99	0

Berdasarkan hasil uji signifikansi jalur (*path coefficient*) sebagaimana disajikan pada tabel, diketahui bahwa Kinerja Aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,647, nilai *T-statistic* sebesar 6,344, dan *P-value* sebesar 0,000.

Selanjutnya, Penelitian dan Pengembangan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,266, nilai *T-statistic* sebesar 2,661, dan *P-value* sebesar 0,008.

Sementara itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa Penelitian dan Pengembangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur, dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,749, nilai *T-statistic* sebesar 8,990, dan *P-value* sebesar 0,000. Dengan demikian, seluruh hubungan antar variabel dalam model penelitian ini dinyatakan signifikan,

sehingga hipotesis yang diajukan dapat diterima.

Hasil Uji Bootstrapping

1. Path Coefficients

Tabel 8

Path Coefficients

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	T statistics (O/STDEV)
Kinerja Aparatur -> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.647	0.647	0.102	6.344	7.344
Penelitian dan Pengembangan -> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.266	0.271	0.1	2.661	3.661
Penelitian dan Pengembangan -> Kinerja Aparatur	0.749	0.751	0.083	8.99	9.99

Berdasarkan hasil uji bootstrapping pada *path coefficients* sebagaimana disajikan pada tabel, diketahui bahwa seluruh hubungan antar variabel dalam model struktural menunjukkan nilai *t-statistics* yang lebih besar dari 1,96 dan nilai *p-values* yang berada di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh jalur pengaruh dalam penelitian ini bersifat signifikan secara statistik.

2. Uji Mediasi

Tabel 9

Uji Mediasi

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Penelitian dan Pengembangan -> Kinerja Aparatur -> Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	0.484	0.483	0.082	5.889	0

Berdasarkan hasil uji bootstrapping pengaruh tidak langsung, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,484 dengan *t-statistics* sebesar 5,889 dan *p-values* sebesar 0,000, yang menunjukkan bahwa pengaruh penelitian dan pengembangan terhadap akuntabilitas pengelolaan

keuangan daerah melalui kinerja aparatur bersifat signifikan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Penelitian dan Pengembangan terhadap Kinerja Aparatur BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Penelitian dan Pengembangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Aparatur. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien jalur sebesar 0,749, nilai *T-statistic* sebesar 8,990, serta *P-value* sebesar 0,000. Temuan ini mengindikasikan bahwa penelitian dan pengembangan memiliki peran yang sangat kuat dalam meningkatkan kinerja aparatur di lingkungan BPKAD Provinsi Sumatera Selatan.

Kinerja Aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kinerja Aparatur berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,647, nilai *T-statistic* sebesar 6,344, serta *P-value* sebesar 0,000, yang telah memenuhi kriteria signifikansi statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin baik kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka semakin tinggi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian dan Pengembangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Hasil analisis menunjukkan bahwa Penelitian dan Pengembangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,266, nilai *T-statistic* sebesar 2,661, dan *P-value* sebesar 0,008. Hasil ini menegaskan bahwa aktivitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh organisasi mampu mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara langsung.

Kinerja Aparatur memediasi pengaruh penelitian dan pengembangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Hasil pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa Penelitian dan Pengembangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Kinerja Aparatur. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,484, nilai *T-statistic* sebesar 5,889, serta *P-value* sebesar 0,000. Dengan demikian, Kinerja Aparatur terbukti berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan tersebut.

Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh langsung Penelitian dan Pengembangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Daerah tetap signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kinerja Aparatur tidak sepenuhnya menggantikan pengaruh langsung Penelitian dan Pengembangan, melainkan memperkuat dan menjembatani hubungan tersebut. Oleh karena itu, peran mediasi yang terbentuk dikategorikan sebagai mediasi parsial.

D. KESIMPULAN

. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan penelitian sebagai berikut:

- Temuan ini menegaskan bahwa penelitian dan pengembangan berperan penting dalam meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan daerah secara efektif.
- Hal ini mengindikasikan bahwa aparatur dengan kinerja yang baik mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah secara lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, kinerja aparatur merupakan faktor strategis dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- Temuan ini menunjukkan bahwa hasil penelitian dan pengembangan yang diterapkan dalam organisasi dapat secara langsung meningkatkan kualitas sistem, prosedur, dan praktik pengelolaan keuangan daerah, sehingga mendorong terciptanya akuntabilitas yang lebih baik.

- Hasil pengujian menunjukkan bahwa penelitian dan pengembangan tidak hanya memengaruhi akuntabilitas secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung melalui peningkatan kinerja aparatur. Karena pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung sama-sama signifikan, maka peran mediasi yang terbentuk dikategorikan sebagai mediasi parsial.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, F. R., & Wati, I. R. (2024). *Pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) melalui komitmen afektif sebagai variabel intervening*. Jurnal Litbang, 20(1), 8-10..
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan*. BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Dina Keuangan hasil pemeriksaan tingkat kepatuhan pelaporan keuangan daerah Provinsi Sumatera Selatan*. BPK RI
- Creswell, J. W. (2022). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.)*. SAGE Publications.
- Damanpour, F. (1991). *Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators*. Academy of Management Journal, 34(3).
- Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi birokrasi dan good governance: Kasus Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

- Efendi, D., & Frinaldi, A. (2024). *Kinerja aparatur dan akuntabilitas birokrasi publik: Analisis empiris pada pemerintah daerah*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 45–58.
- Efendi, T., & Frinaldi, A. (2024). *Inovasi sebagai Pilar Reformasi Birokrasi: Kajian Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Organisasi Sektor Publik*. Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced, 2(4), 630-639.
- Ghozali, I., & Kusumadewi, K. (2023). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 4.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, et.al., (2022). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Hakim, dkk., (2025). *Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah: Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh*. Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi, 3(2), 185–204.
- Halim, Abdullah, dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hilmawan, dkk., (2023). *Inovasi birokrasi dan peran penelitian dan pengembangan (R&D) dalam meningkatkan kinerja aparatur publik*. Jurnal Inovasi Pemerintahan Daerah, 9(2), 101–115.
- Nazir, M. (2021). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Putra, A. R., & Sari, D. P. (2021). *Pengaruh inovasi dan pengembangan SDM terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah*. Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 45–58.
- Putra, D., & Sari, R. (2021). *Pengaruh kinerja aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah*. Jurnal Akuntansi Publik, 9(2), 85–96.
- Putra, F. R. A., & Wati, I. R. (2024). *Pengaruh penelitian dan pengembangan terhadap kinerja aparatur dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah*. Jurnal Inovasi Pemerintahan Daerah, 12(1), 55–68.*
- Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). *Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy*. Public Administration Review, 47(3), 227–238.
- Sande, P. 2013. *"Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah"*. Artikel skripsi.
- Sari, D., & Abdullah, A. (2021). *Audit opinion and accountability of local government financial management in Indonesia*. Asian Journal of Accounting Research, 6(2), 108–120.
- Sari, R. P., dkk., (2023). *Pengaruh kinerja aparatur pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah terhadap penerapan good governance (Studi kasus di Kecamatan Koto XI Tarusan)*. Ekonomika Publik: Jurnal Akuntansi dan Administrasi, 11(2), 34–47.
- Sedarmayanti. (2020). *Good governance: Kepemerintahan yang baik dalam rangka otonomi daerah*.

Mandar Maju

- Soete, L., et.al., (2021). *Economic impact of public R&D: An international perspective. Industrial and Corporate Change*, 31(1), 1–20.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- World Bank. (2020). *World development report 2020: Trading for development in the age of global value chains*. World Bank Publications